

COMMUNIQUE

ISSN : 1829-5851

DAFTAR ISI

Praktek Penyuaapan Untuk Publisitas Dalam Industri *Public Relations*

Deborah N. Simorangkir

1-14

Media Massa Sebagai Medium Komunikasi Simbolik Artifaktual Budaya Populer Di Indonesia

Elda Franzia

15-30

Komunikasi Antar Pribadi Dalam Perspektif Alkitab

Rose Fmmaria Tarigan

31-55

Menuju Teori Dan Metode Analisis Pesan Komunikasi

Andrik Purwasito

56-71

Social Media Metrics* dan Trend Penelitian Efektivitas *Social Media

Allia Pramiyanti, Heppy Milahyani

72-94

Telaah Studi Implikatur Dalam Memahami Pelanggaran Aturan Maksim Percakapan Dalam Komunikasi Politik

Bambang Sukma Wijaya

95-110





TELAAH STUDI IMPLIKATUR DALAM MEMAHAMI PELANGGARAN
ATURAN MAKSIM PERCAKAPAN DALAM KOMUNIKASI POLITIK:
ANALISIS PERCAKAPAN WACANA PENYELEWENGAN DANA DKP
AMIEN RAIS-SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

*A Review of the Implicature Study in Tolerating the Rule's
Infringement of Conversation Maxims in the Political
Communication: Conversation Analysis on the Deviation of DKP's
Non-Budgetary Funds' Discourse between Amien Rais and Susilo
Bambang Yudhoyono*

Bambang Sukma Wijaya
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bakrie
Kampus Kuningan, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H. R. Rasuna
Said Kav. C-22 Jakarta 12920

DOI: 10.13140/2.1.1602.2565

Abstract

The implicature studies typically used to analyze the rule's infringement of conversation maxim at a direct conversational discourse object in interpersonal communication. In this paper, the author tries to analyze an indirect conversation through the mass media in the form of the polemic of a political communication's phenomenon between Amien Rais and President Susilo Bambang Yudhoyono in 2007 regarding the deviation of DKP's non-budgetary funds and the alleged of foreign funds usage. Although the polemics or public discourse that evolved is not an ordinary/ direct conversation, but this research shows that it could be analyzed by using the analytical tool of conversation maxim and Paul Grice's implicature studies theory that based on the objects of direct conversation analysis, assuming that the war statements between the two national leaders can be categorized as a rhetorical conversation. This analysis opens space for the application of the method and the theory of ordinary/ directly conversation on the conversation in the context of public discourse so far that discourses indicate the typical characters that commonly arise in the ordinary conversation, such as regularity, continuity, reciprocity or showing action-reaction.



Keywords: *Implicature Study, Conversation Analysis, Political Communication, Conversation Maxims*

Abstrak

Studi Implikatur biasanya digunakan untuk menganalisis pelanggaran aturan maksim percakapan pada suatu obyek wacana percakapan langsung dalam komunikasi antarpribadi. Dalam tulisan ini, penulis mencoba menganalisis sebuah percakapan tidak langsung melalui media massa dalam bentuk polemik sebuah fenomena komunikasi politik antara Amien Rais dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007 menyangkut penyelewengan dana nonbujeter DKP dan dugaan penggunaan dana asing. Walaupun polemik atau wacana publik yang berkembang bukanlah sebuah percakapan biasa, namun dari hasil eksperimentasi penulis ternyata dapat ditelaah dengan menggunakan alat analisis maksim percakapan dan teori studi implikatur dari Paul Grice yang berbasis obyek analisis percakapan langsung. Hal ini dengan asumsi bahwa perang *statement* antara kedua tokoh nasional tersebut dapat dikategorikan sebagai percakapan retorik. Hasil analisis penulis ini membuka ruang bagi penerapan metode dan teori percakapan biasa (langsung) pada percakapan dalam konteks wacana publik sejauh wacana tersebut mengindikasikan adanya karakter-karakter khas yang biasa muncul pada percakapan biasa, seperti keteraturan, kesinambungan, ketimbal-balikan atau menunjukkan aksi-reaksi.

Kata Kunci: Studi Implikatur, Analisis Percakapan, Komunikasi Politik, Maksim Percakapan

A. PENDAHULUAN

Awalnya adalah sebuah pernyataan dari tersangka kasus penyelewengan dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yakni Rokhmin Dahuri yang menyebut bahwa para calon presiden dan tim kampanye presiden tahun 2004 ikut menerima dana nonbujeter tersebut, termasuk Amien Rais.

Pernyataan ini berlanjut dengan pengakuan Amien Rais bahwa dia menerima dana tersebut langsung dari Menteri Rokhmin Dahuri dalam bentuk enam lembar cek. Dana sejumlah Rp 200 juta tersebut digunakan tim



suksesnya untuk membayar iklan di televisi. Amien Rais menyatakan siap dipenjara jika terbukti perbuatannya tersebut dianggap melawan hukum. Namun, dia mengingatkan agar pengadilan bersikap adil dengan memberikan hukuman berabad-abad bagi para koruptor yang merugikan negara hingga bertriliun-triliun rupiah. Dia juga mensinyalir kalau dana nonbujeter tersebut juga diterima oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lain.

Pernyataan jujur Amien Rais ini segera mendapat sambutan positif dari masyarakat dan media massa. Media Indonesia misalnya, menulis tajuk rencananya dengan judul Kejujuran Amien Rais. Dalam tajuk rencananya tersebut, Media Indonesia menulis, “Amien Rais telah melawan kemunafikan yang lama diterima dan dihipokritasi di dalam lingkungan perpolitikan Indonesia. Tetapi keberanian dan kejujuran Amien itu tidak banyak manfaatnya kalau hanya muncul dari Amien seorang.”

Uraian tersebut untuk menyindir politisi maupun calon presiden dan wakil presiden lain yang mengelak dan menghindar dari tuduhan penerimaan dana nonbujeter DKP, meskipun tersangka Rokhmin Dahuri dan stafnya memiliki catatan nama-nama penerima.

Wacana tentang penyelewengan dana nonbujeter DKP berkembang luas setelah Amien Rais mengungkapkan bahkan ada pasangan capres-cawapres yang menerima dana dari pihak asing, yang berarti melanggar ketentuan tentang pemilihan presiden. Amien Rais juga menyoroti banyaknya dana fiktif yang mengalir ke kas tim sukses kampanye capres-cawapres.

Pernyataan-pernyataan Amien Rais tersebut kemudian disambuti media dengan mengungkapkan sejumlah data dari berbagai sumber dan nara sumber yang mendukung sinyalemen Amien Rais. Media Indonesia (19/05/2007) misalnya mendesak KPU untuk mengungkap dana asing dalam Pilpres 2004. Masyarakat, terutama para mahasiswa juga melakukan unjuk rasa untuk



mendesak pengungkapan kasus dana asing maupun dana fiktif yang merupakan bentuk pelanggaran UU No. 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden.

Eskalasi wacana dan polemik semakin meningkat setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan reaksi dengan menjawab berbagai sinyalemen Amien Rais melalui konferensi pers di halaman tengah Istana Kepresidenan. Hal ini dilakukan SBY karena –walaupun tanpa menyebut nama—sinyalemen Amien Rais dianggapnya mengarah kepada dirinya dan wakil presiden Jusuf Kalla yang pada pemilihan presiden 2004 merupakan salah satu kontestan. SBY berujar, “Opini yang dibangun Amien Rais benar-benar menyesatkan dan tidak sehat. Tuduhan ini sungguh keterlaluhan, fitnah yang kejam, *nauzubillah minzalik.*” Namun, meskipun sinyalemen tersebut bisa berkembang menjadi fitnah, SBY mengatakan tidak akan menuntut Amien Rais secara hukum.

Media Indonesia dalam tajuk rencananya berjudul *Sanggahan Antiklimaks di Halaman Istana* menyebut pengakuan SBY yang meskipun telah membaca KUHP pasal 310 tentang perusakan nama baik sampai tiga kali namun tidak akan menuntut Amien Rais secara hukum merupakan pernyataan antiklimaks yang dilontarkan seorang kepala Negara dan kepala pemerintahan yang mestinya memberi contoh bagi tegaknya hukum tanpa pandang bulu. Sedangkan Kompas dalam tajuk rencananya menyebut polemik dan wacana yang berkembang selama hampir dua minggu dan membangkitkan reaksi berantai tersebut sebagai “tsunami” politik dan menenggelamkan isu-isu lain yang tak kalah penting seperti isu hak asasi manusia dalam peristiwa Mei kelabu sembilan tahun silam.

Menanggapi tuduhan maupun pernyataan berbau ancaman yang dilontarkan SBY, Amien Rais menanggapi dengan menantang untuk lebih terbuka. “Saya yakin sekali, kalau nanti dibuka, cukup menggemparkan,” ucap Amien Rais di kediamannya di Yogya.



Namun, ketika eskalasi wacana kian menghampiri titik klimaks, mendadak Amien Rais-SBY bersepakat untuk mengakhiri pertikaian. Keduanya bertemu tanggal 28 Mei 2007 di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan saling memaafkan. Selain untuk mengaktifkan komunikasi yang mampet dan menghilangkan kesalahpahaman, keduanya juga sepakat untuk menyerahkan masalah yang selama ini menjadi polemik ke ranah hukum, bukan politik. Salah satu pertimbangan keduanya untuk mengakhiri pertikaian adalah kondisi rakyat yang membutuhkan perhatian lebih, terutama dengan naiknya harga-harga bahan pokok seperti minyak goreng, dan sebagainya.

Banyak yang mengecam dan mencurigai kesepakatan tersebut. Beberapa mahasiswa memprotes tindakan Amien Rais yang ‘melunak’, sedangkan media-media menguatirkan kelanjutan kasus penyelewengan dana nonbujeter DKP maupun kasus dana asing dan dana fiktif. Semua pihak setuju bahwa perdamaian Amien – SBY tersebut tidak boleh menggajal proses hukum yang telah berjalan.

B. TEORI MAKSIM PERCAKAPAN DAN STUDI IMPLIKATUR

Sebuah percakapan dipandang sebagai sebuah pencapaian sosial karena mengharuskan kita melakukan sesuatu secara kooperatif melalui pembicaraan (Littlejohn, 2008: 164). Analisis percakapan (*conversation analysis*) mencoba untuk menemukan dengan tepat apa pencapaian itu dengan menguji secara seksama suatu transkrip percakapan.

Aspek yang paling penting dalam analisis percakapan adalah hubungan percakapan (*conversational coherence*). Hubungan percakapan dapat diartikan sebagai keterkaitan dan keberartian dalam percakapan. Sebuah percakapan yang jelas atau koheren biasanya tersusun dengan baik dan masuk akal bagi pelaku percakapan. Koherensi kelihatannya mudah, namun dalam praktiknya



sangatlah kompleks dan tidak dapat dipahami bersamaan antarpelaku percakapan. Dalam hal ini, prinsip atau maksim-maksim yang dikembangkan oleh H. Paul Grice kerap menjadi acuan para peneliti atau analis percakapan untuk memahami hubungan percakapan.

Prinsip utama Grice dalam memahami hubungan percakapan adalah kerjasama, dalam arti kontribusi seseorang dalam percakapan haruslah tepat. Kerjasama di sini tidak berarti selalu berupa pengungkapan persetujuan, tetapi lebih kepada bahwa seseorang mau menyumbangkan sesuatu yang berhubungan dengan tujuan percakapan. Dengan demikian tujuan atau arah percakapan menjadi penting untuk dipahami masing-masing pelaku percakapan.

Grice mengajukan empat maksim percakapan untuk mencapai kerjasama tersebut. Pertama adalah *maksim kuantitas*, yang berarti kontribusi seseorang hendaklah memberikan informasi yang cukup. Seorang pelaku percakapan dianggap melanggar maksim kuantitas jika komentar yang disampaikan kurang atau terlalu banyak. Lalu *maksim kualitas*, yang berarti kontribusi seseorang hendaklah jujur dan benar. Seorang pelaku percakapan dianggap melanggar maksim kualitas jika pelaku tersebut sengaja berbohong atau berkomunikasi dengan cara yang tidak menunjukkan maksud untuk jujur. Kemudian *maksim relevansi*, yang berarti komentar seseorang harus berhubungan dengan konteks percakapan saat itu, dan yang terakhir adalah *maksim sikap atau tatakrama*, yang berarti seorang pelaku percakapan tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak jelas, ambigu atau mengacaukan (tidak teratur).

Sekali lagi, prinsip kerjasama ini tampaknya sederhana, namun dalam praktiknya seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran –bahkan kadang-kadang dengan sengaja—terhadap maksim-maksim percakapan seperti yang diungkapkan Grice di atas. Dengan kata lain, pelanggaran merupakan sebuah masalah yang harus dihadapi oleh pelaku komunikasi dan mereka harus



melakukannya bersama-sama (Littlejohn, 2008: 166). Salah satu jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan –paling umum terjadi dalam konteks budaya komunikasi ketimuran—adalah mengatakan sesuatu secara tidak langsung atau berbasa-basi. Selain latar belakang konteks budaya, komunikasi tidak langsung juga kerap dilatarbelakangi oleh alasan sosial dan pribadi seperti kesopanan, karena perasaan “tidak enak” untuk mengatakan langsung, dan sebagainya.

Toleransi dan lisensi pelanggaran maksim ini dapat ditelaah melalui Studi Implikatur (*Implicatures Study*), yaitu studi tentang aturan-aturan yang digunakan orang untuk memahami atau membenarkan pelanggaran aturan main. Implikatur ini sangat penting bagi pengelolaan seluruh percakapan. Kita menangani pelanggaran dengan membuat penafsiran tertentu yang disebut implikatur percakapan (*conversational implicatures*) untuk membantu kita memahami apa yang dinyatakan atau diimplikasikan oleh pelanggaran nyata. Untuk menoleransi pelanggar agar berbuat sesuai dengan prinsip kerjasama, pendengar harus menghubungkan beberapa makna tambahan yang akan membuat kontribusi pembicara menjadi tampak sesuai dengan prinsipnya. Seorang pelaku percakapan yang sengaja melakukan pelanggaran sesungguhnya mengira atau menganggap bahwa pendengar atau mitra bicaranya mengerti bahwa dia tidak bermaksud keluar dari prinsip kerjasama yang sedang dibangun. Dengan demikian diperlakukan kesalingpengertian antarpelaku percakapan. Ini berarti bahwa implikatur percakapan memungkinkan seorang pelaku percakapan untuk menggunakan semua jenis pernyataan tidak langsung yang menarik guna mencapai tujuan tanpa harus dinilai tidak kompeten.

Studi tentang implikatur percakapan sesungguhnya merupakan studi tentang aturan-aturan yang digunakan untuk memahami pelanggaran-pelanggaran dan implikatur ini sangat penting bagi keseluruhan pengaturan



percakapan. Namun demikian, pandangan-pandangan tradisional menganggap bahwa pelaku komunikasi yang kompeten setidaknya bermaksud untuk bekerjasama. Dalam Teori Manipulasi Informasi, Steven McCornack dan timnya mempertanyakan mengenai studi implikatur dengan menyatakan bahwa manusia seringkali sengaja berbohong dengan melanggar prinsip kerjasama melalui maksim percakapan Grice. Kesengajaan tersebut merupakan bentuk-bentuk manipulasi yang dirancang untuk membohongi pendengar, sehingga pelanggaran dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yakni pelanggaran yang jujur dan pelanggaran yang bohong.

C. METODE PENELITIAN

Analisis Percakapan (*Conversation Analysis*) biasanya digunakan untuk menelaah percakapan langsung antarpribadi. Analisis Percakapan adalah sebuah metode untuk mempelajari struktur dan proses interaksi sosial di antara umat manusia (Perakyla dalam Denzin & Lincoln, 2011: 254). Dalam tulisan ini, penulis bereksperimen dengan mencoba menganalisis percakapan wacana publik melalui media massa antara dua tokoh politik, yakni Amien Rais dan Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan prinsip kerjasama yang dikembangkan Grice dengan analisis maksim percakapan dan studi implikatur untuk memahami pelanggaran yang terjadi.

Diharapkan, dengan eksperimentasi ini, analisis percakapan (*conversation analysis*) dapat dikembangkan lebih luas dari percakapan wacana langsung antarpribadi ke percakapan dalam konteks wacana publik melalui media massa. Hal ini dikarenakan bahwa seringkali pemberitaan media massa mengutip ungkapan-ungkapan tokoh menjadi topik berita utama dan dilakukan secara berkesinambungan dan timbal-balik sebagai bagian dari prinsip *cover both sides* jurnalistik. Selain itu, di zaman yang banyak

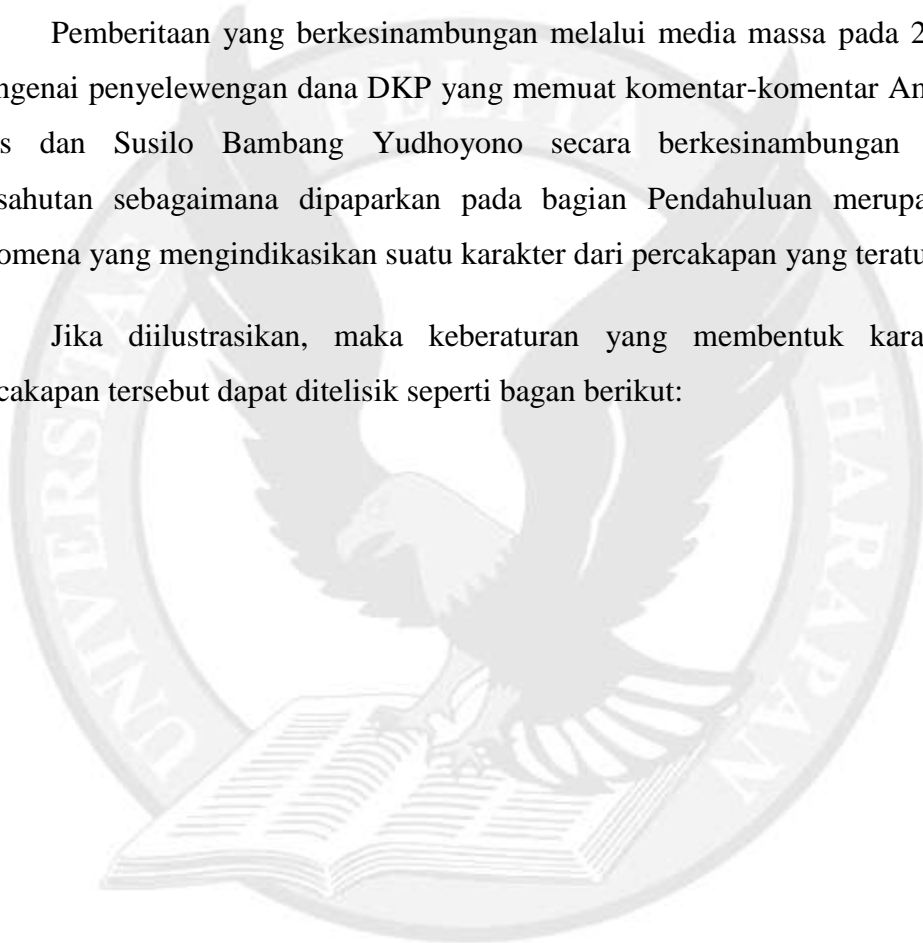


menggunakan media dalam komunikasi saat ini, interaksi sosial pun dapat terjadi atau berlangsung dengan menggunakan media, baik secara sengaja maupun tak sengaja.

D. ANALISIS PERCAKAPAN WACANA PUBLIK AMIEN RAIS-SBY

Pemberitaan yang berkesinambungan melalui media massa pada 2007 mengenai penyelewengan dana DKP yang memuat komentar-komentar Amien Rais dan Susilo Bambang Yudhoyono secara berkesinambungan dan bersahutan sebagaimana dipaparkan pada bagian Pendahuluan merupakan fenomena yang mengindikasikan suatu karakter dari percakapan yang teratur.

Jika diilustrasikan, maka keberaturan yang membentuk karakter percakapan tersebut dapat ditelisik seperti bagan berikut:





Amien Rais mengaku soal dana DKP

SBY diam

Amien Rais mensinyalir dana asing dan dana fiktif

SBY membantah dan mengecam Amien Rais

Amien Rais menantang untuk lebih blak-blakan

SBY ajak damai dengan alasan minyak goreng

Amien Rais setuju demi kepentingan rakyat

Gambar 1. Ilustrasi percakapan wacana publik melalui pemberitaan media massa antara Amien Rais dan SBY

Seperti dijelaskan sebelumnya, Grice mengajukan prinsip kerjasama, yang berarti kontribusi seseorang haruslah sesuai –sebagai asumsi dasar yang paling kompeten dalam teori maksim percakapan. Kerjasama di sini berarti



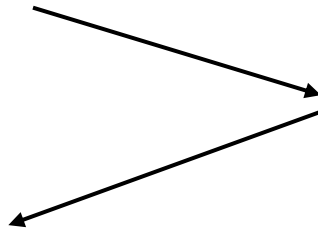
ungkapan kesepakatan, di mana orang ingin berkontribusi dengan cara yang searah dengan tujuan percakapan.

Dalam kasus wacana percakapan retorik di atas, terlihat upaya SBY menanggapi sinyalemen Amien Rais sebagai sebuah kontribusi yang mengarah pada tujuan percakapan yakni pengungkapan kejujuran mengenai dana kampanye pemilihan presiden 2004.

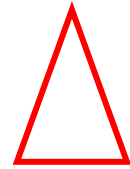
Jika melihat dari empat maksim yang disampaikan Grice, terlihat SBY berkali-kali melakukan pelanggaran maksim percakapan. Pertama adalah maksim kuantitas dengan memberikan komentar yang tidak memadai (tidak memberikan komentar) ketika Amien Rais menanggapi isu penyelewangan dana DKP. Kedua, pelanggaran maksim relevansi ketika SBY melakukan pengalihan isu dengan mengajak damai Amien Rais demi kepentingan rakyat yang sedang menghadapi masalah kenaikan harga bahan pokok termasuk minyak goreng. Menurut Grice, pelanggaran maksim relevansi terjadi apabila seorang pelaku percakapan memberikan komentar atau melakukan aksi bicara yang tidak sesuai dengan konteks percakapan.



Amien Rais mengaku soal dana DKP



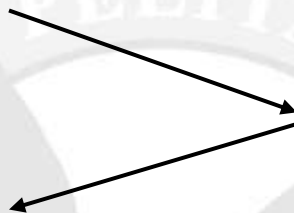
SBY diam



ALERT !

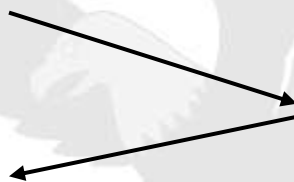
Pelanggaran Maksim Kuantitas

Amien Rais mensinyalir dana asing dan dana fiktif



SBY membantah dan mengecam Amien Rais

Amien Rais menantang untuk lebih blak-blakan



SBY ajak damai dengan alasan minyak goreng

Amien Rais setuju demi kepentingan rakyat



ALERT !

Pelanggaran Maksim Relevansi

Toleransi Pelanggaran (Implikatur Percakapan)

Gambar 2. Implikatur percakapan wacana publik melalui pemberitaan media massa antara Amien Rais dan SBY dalam memahami pelanggaran maksim percakapan



Terlihat bahwa salah satu alasan SBY mengakhiri pertikaian dengan Amien Rais karena rakyat memerlukan perhatian lebih akibat harga-harga bahan pokok seperti minyak goreng terus naik jelas merupakan pelanggaran maksim relevansi. Konteks pembicaraan kasus penggunaan dana kampanye yang menyalahi undang-undang dan kasus dana penyelewengan dana nonbujeter DKP sama sekali tidak ada hubungannya dengan penderitaan rakyat akibat kenaikan harga minyak goreng. Namun, Amien Rais berusaha menoleransinya dengan menyambut itikad kompromi SBY –meskipun mendapat tentangan dari banyak pihak—dengan alasan demi kepentingan rakyat.

Toleransi dan lisensi pelanggaran maksim ini dapat ditelaah melalui Studi Implikatur, yaitu studi tentang aturan-aturan yang digunakan orang untuk memahami atau membenarkan pelanggaran aturan main. Implikator ini sangat penting bagi pengelolaan seluruh percakapan.

SBY kemungkinan menggunakan momen dan isu kenaikan harga bahan pokok sebagai upaya pengalihan isu agar tidak berkembang semakin luas dan kuat. Upaya SBY ini bisa dipahami, karena jika hal tersebut terjadi, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan peluang pemakzulan terhadap SBY. Seperti yang diungkapkan oleh Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM bahwa jika terbukti Presiden SBY menerima dana nonbujeter DKP, maka bisa berujung pada pemakzulan. Hal ini bila kasus tersebut mengacu pada UU Antikorupsi atau UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Jika ditelaah dari sudut pandang Teori Manipulasi Informasi, maka kesengajaan dalam pengalihan isu merupakan bentuk manipulasi untuk membohongi publik.

Hal yang menarik untuk diperhatikan pula, bahwa “pengalihan isu” yang merupakan pelanggaran maksim relevansi dalam percakapan tampaknya



menjadi tren pula dalam “percakapan” pemberitaan media dewasa ini. Terlihat bahwa peran media cukup signifikan dalam menjalankan aksi “percakapan” tersebut, terutama berkaitan “percakapan” komunikasi politik. Seringkali, pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik (baik pemerintah/ penguasa maupun pihak-pihak lain) seolah sengaja mengalihkan isu dengan memunculkan topik baru, ketika sebuah topik mencapai eskalasi “percakapan” pemberitaan yang memuncak di media-media massa yang ditandai dengan pengeksposan berita yang sambung-menyambung antarmedia. Pengalihan isu tersebut bisa jadi untuk “menyelamatkan” citra penguasa atau pihak-pihak yang dipojokkan oleh topik “percakapan”. Menariknya, media yang memiliki peran penting dalam “percakapan” tersebut pun seperti melakukan implikatur percakapan dengan mengikuti arus pengalihan tersebut dan meninggalkan topic sebelumnya, sebagaimana kasus Amien Rais-SBY yang menyetujui ajakan damai SBY demi kepentingan rakyat.

Hal ini membuka ruang bagi eksplorasi analisis percakapan lebih luas, baik dalam konteks percakapan antarpribadi melalui/ memanfaatkan media massa maupun dalam konteks “percakapan” pemberitaan media atas suatu topik yang dilakukan bersahutan antarmedia.

E. SIMPULAN

Walaupun polemik atau wacana publik yang berkembang menyangkut penyelewengan dana nonbujeter DKP dan dugaan penggunaan dana asing yang melibatkan Amien Rais dan SBY bukanlah sebuah percakapan biasa, namun ternyata bisa ditelaah dengan menggunakan alat analisis maksim percakapan dan studi implikatur. Hal ini dengan asumsi bahwa perang *statement* atau komentar antara kedua tokoh nasional tersebut dapat dikategorikan sebagai percakapan retorik. Hasil eksperimen penulis ini membuka ruang analisis



percakapan biasa untuk dapat diterapkan pada wacana publik sejauh wacana tersebut mengindikasikan adanya karakter-karakter khas yang biasa muncul pada percakapan biasa, seperti keteraturan, kesinambungan, ketimbal-balikan atau menunjukkan aksi-reaksi.

Namun demikian, percakapan retorik tetap memiliki keterbatasan seperti dalam mengukur maksim kuantitas sangat abstrak, dikarenakan retorika memiliki volume dan kapasitas pesan yang berbeda dengan percakapan biasa. Penggunaan media massa juga menimbulkan kesulitan untuk mengukur maksim kualitas yaitu kejujuran, karena memungkinkan terjadinya distorsi pesan dalam penyuntingan berita, terutama bila dilihat dari sudut kepentingan *agenda setting* media.

Ruang lain yang patut untuk dieksplorasi menggunakan analisis percakapan adalah “percakapan” antarpemberitaan media dan percakapan dalam *social media* yang dewasa ini sedang berkembang. Selain memahami maksim-maksim percakapan, juga dapat lebih jauh dengan mengungkap makna-makna tersembunyi di balik aksi atau kemungkinan terjadinya manipulasi-manipulasi tertentu untuk mengaburkan tujuan percakapan.

Karena itu, penulis menyarankan perlunya eksperimen-eksperimen lebih lanjut untuk menemukan suatu formula aplikasi yang tepat bagi pengembangan teori. Sehingga, bukan tidak mungkin, eksperimentasi tersebut dapat menghasilkan suatu teori maupun metode baru dalam menganalisis percakapan dalam berbagai macam konteks dan bentuk komunikasi.

F. DAFTAR PUSTAKA

Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. (2011). *The Sage Handbook of Qualitative Research 2*. Penerj: Dariyatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar



Littlejohn, Stephen W. dan Karen A. Foss. (2008). *Theories of Human Communication*. USA: Wadsworth

Kompas, Sabtu, 26 Mei 2007

Kompas, Selasa, 29 Mei 2007

Koran Tempo, Rabu, 16 Mei 2007

Koran Tempo, Sabtu, 26 Mei 2007

Koran Tempo, Senin, 28 Mei 2007

Koran Tempo, Selasa, 29 Mei 2007

Media Indonesia, Selasa, 15 Mei 2007

Media Indonesia, Rabu, 16 Mei 2007

Media Indonesia, Kamis, 17 Mei 2007

Media Indonesia, Sabtu, 26 Mei 2007

Media Indonesia, Selasa, 29 Mei 2007

Media Indonesia, Rabu, 30 Mei 2007